



Proceeding

SEMINAR NASIONAL

**PELUANG DAN TANTANGAN
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA):
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sabtu, 25 April 2015



25062015
271-① ✓

SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

YOGYAKARTA, 25 APRIL 2015



Diselenggarakan atas kerjasama:



JURNAL
**MEDIA
HUKUM**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**
Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut

Penyunting:

Drs. Mujiyana, MSI.

Dr. Martino Sardi, M.A.

Desain Layout:

Soeprijadi

Penerbit:

Laboratorium Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 2

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 387656 Ext. 124

Buku ini diterbitkan sebagai Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UMY di Yogyakarta tanggal 25 April 2015

ISBN: 978-602-72534-0-7

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema "Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut" dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselenggara atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jurnal Media Hukum. Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut menjadi sumbangan pemikiran, media tukar menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 April 2015

Dekan

Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?	
Hikmahanto Juwana	8
STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i>	
Mukti Fajar ND	11
BIDANG I: POLITIK HUKUM	
01. PENEGAKAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN	
Rochmani	34
02. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA	
Ane Permatasari	54
03. POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN	
Khaidir Anwar dan Eddy Rifai	68
04. TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MEA 2015	
Septi Nur Wijayanti	82
05. PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL	
Rofi Aulia Rahman	93
06. PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ARBITRASE DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	
Fadia Fitriyanti, Andika Putra	101
07. ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
Magdariza	113

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

08.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Dewi Nurul Musjtari	122
09.	STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL Yeni Widowaty	135
10.	AKIBAT HUKUM RATIFIKASI PIAGAM ASEAN DAN PIAGAM IORA TERHADAP PENGATURAN KEPELABUHANAN MENUJU <i>SINGLE SHIPPING MARKET</i> DI INDONESIA Ferdi	145
11.	PARADIGMA PROFETIK: REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA Naya Amin Zaini	155
12.	POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Nanik Prasetyoningsih	177
13.	IMPLEMENTASI <i>GREEN CONSTITUTION</i> MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG Tanto Lailam	191
BIDANG II : HUKUM DAN PEMBANGUNAN		
14.	LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN PELUANG INVESTASI ASING DI INDONESIA FX. Sumarja	202
15.	MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING Djoko Imbawani Atmadjaja	217
16.	PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DI ACEH DALAM KAITAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN SECARA BERKEADILAN Sulaiman, Teuku Muttaqin Mansur, Zulfan, M. Adli Abdullah	226
17.	LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : SUATU TINJAUAN DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN Delfiyanti	241

BIDANG III: PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT

18.	PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Eko Suwarni	256
19.	<i>MARINE PROTECTION AREA</i> SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN WILAYAH LAUT INDONESIA Noer Indriati	266
20.	PENERAPAN <i>BLUE ECONOMY</i> DALAM KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA LAUT GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA MENYONGSONG MEA Dhiana Puspitawati, Yasniar Rachmawati Madjid	274
21.	SUMBER DAYA LAUT INDONESIA DALAM KANCAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, ANTARA JEBAKAN REIFIKASI DAN <i>DEEP ECOLOGY</i> Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso	386
22.	PENANGGULANGAN <i>ILLEGAL FISHING</i> DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELAUTAN Shinta Agustina	301
23.	OPTIMALISASI PENETAPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT Indien Winarwati	313
24.	PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS IKAN TERUBUK BENGKALIS DALAM KERANGKA PERDAGANGAN REGIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Zulfikar Jayakusuma	327
25.	PELIBATAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LAUT INDONESIA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS MENGHADAPI <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i> Muhammad Anif Afandi, Deni Febrian	339
BIDANG IV: UMUM		
26.	STRATEGI PERLINDUNGAN BATIK WARNA ALAM DENGAN PENDEKATAN <i>GREEN ECONOMY</i> MENGHADAPI <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i> Siti Nurhayati	360

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

27.	ANTISIPASI PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (<i>PROCUREMENT</i>) DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI	
	Agus Budianto, Vincentia Esti P., Yosephus Mainake	372
28.	MENGAJI JARINGAN MODAL SOSIAL NELAYAN DAN DAMPAK KERAGAMAN ETNIS DI KEHIDUPAN NELAYAN PANTAI SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG	
	Bhimo Rizky Samudro, Yogi Pasca Pratama, Sutomo	391
29.	PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
	Reaza Rahmatika	406
30.	STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN MODAL PETANI MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : KAJIAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM RESI GUDANG	
	Siti Zulaekhhah, Sri Kuswinarni, Ari Handriatni	415
31.	MENGUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI <i>CONTINENTAL</i> MENJADI <i>MARITIM BASED</i> (<i>TRANSFORMASI JALESVEVA JAYAMAHE</i> KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA MENGHADAPI MEA 2015)	
	Qur'ani Dewi Kusumawardani	428
32.	PENGUATAN KARAKTER DAN MORAL BANGSA MENGHADAPI PERSAINGAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI BUDAYA ANTI PLAGIASI	
	Siti As'adah Hijriwati, Achmad Soeharto	442
33.	MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ASEAN	
	Martino Sardi	451
34.	PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	Masrullah, Murdian Munandar	458
35.	KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL	
	Yordan Gunawan, S.H., MBA, Muhammad Arizka Wahyu	473

**MENKAJI JARINGAN MODAL SOSIAL NELAYAN DAN DAMPAK KERAGAMAN ETNIS
DI KEHIDUPAN NELAYAN PANTAI SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG**

Bhimo Rizky Samudro, Yogi Pasca Pratama, Sutomo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK

Perubahan paradigma pembangunan nasional dari *land-based economic development* menjadi *ocean-based economic development* mendorong pemerintah daerah di Indonesia menjadikan pembangunan kelautan sebagai platform pembangunan ekonominya. Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah potensial dalam pengembangan sumber daya kelautan, khususnya di kawasan Kabupaten Malang bagian selatan, yaitu pantai Sendang Biru. Kebijakan yang sinergis antara Pemerintahan Pusat dan Provinsi Jawa Timur akan menjadikan Pusat Pendaratan Ikan Pondok Dadap Sendang Biru sebagai pelabuhan ikan terbesar kedua setelah Cilacap di daerah selatan Pulau Jawa.

Berdasarkan pertimbangan geografis, topografis, dan oceanografis pantai Sendang Biru merupakan pantai terbaik di Selatan Jawa, karena: (1) berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan IX; yang menjadi alur migrasi ikan pelagis besar, terutama ikan tuna; (2) memiliki *barrier* Pulau Sempu: panjang selat 4 km, lebar 400-1500 m, kedalaman rata-rata 20 m, sehingga perairan di wilayah tersebut relatif tenang; (3) mudah terjangkau oleh transportasi; dan (4) secara topografis kedalaman sesuai untuk berlabuhnya armada penangkapan domestik maupun luar daerah.

Pengamatan terhadap aktivitas sosioekonomi pantai Sendang Biru telah dapat mengidentifikasi beberapa hal menarik, yaitu 1) jumlah nelayan yang semakin meningkat cenderung memicu konflik horizontal antara nelayan pendatang dan lokal; 2) modal sosial yang muncul dalam komunitas nelayan berkaitan dengan keragaman etnis yang ada; 3) kebijakan yang diarahkan untuk merespon permasalahan sosioekonomi dan demografi masih kurang jika dibandingkan dengan kebijakan yang terlalu berfokus hanya pada aspek ekonomi nelayan.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan yang ada, penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan identifikasi pola sosioekonomi dan demografis aktivitas nelayan di pantai Sendang Biru. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa struktur modal sosial nelayan pantai Sendang Biru. Modal sosial dalam konteks ini diartikan sebagai pola kecenderungan kelompok masyarakat mengembangkan potensi individu (misal: kepercayaan dan jejaring) dan komunal (misal: institusi norma, moral dan etika) untuk meningkatkan kualitas hidup

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

sebagai kumulatif kausa dari keterkaitan struktural antar potensi tersebut. Setelah struktur modal sosial dapat diidentifikasi, penelitian ini bertujuan menganalisa implikasi manajemen dari pola struktur modal sosial yang ada terhadap proses aktivitas ekonomi nelayan dalam menghasilkan outputnya.

Penelitian ini menggunakan kombinasi metode historis naratif dan logis induktif. Proses wawancara dan kajian risalah menjadi cara dalam mengumpulkan data. Data yang didapatkan berupa komposisi data primer dan sekunder berkaitan dengan aktivitas sosioekonomi dan demografis pantai Sendang Biru.

Hasil sementara yang didapatkan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa: 1) terdapat pola persaingan etnis nelayan Bugis, Madura dan nelayan lokal dalam aktivitas sosioekonomi; 2) struktur modal sosial nelayan etnis Bugis menempatkan mereka sebagai kelompok dominan; 3) implikasi manajemen dari dominasi etnis Bugis mengarahkan mereka untuk berperan sebagai nelayan pemilik modal dan penyedia sarana nelayan. Penelitian ini masih berlangsung dalam mengidentifikasi lebih dalam tentang struktur modal sosial dan beserta implikasi manajemen dari aktivitas nelayan.

Kata kunci: modal sosial, nelayan, keragaman etnis

Pendahuluan

Perubahan paradigma pembangunan nasional dari *land-based economic development* menjadi *ocean-based economic development* mendorong pemerintah Kabupaten Malang menjadikan pembangunan kelautan sebagai platform pembangunan ekonominya khususnya di Malang Selatan. Sehingga hampir semua variabel politik-ekonomi diarahkan terhadap kinerja ekonomi kelautan. Sehingga pembangunan kelautan diharapkan menjadi tujuh program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Malang (Rubianto, 2001). Kebijakan yang sinergis antara Pemerintahan Pusat dan Provinsi Jawa Timur akan menjadikan Pusat Pendaratan Ikan Pondok dadap Sendang Biru sebagai pelabuhan ikan terbesar kedua setelah Cilacap di daerah selatan Pulau Jawa. Berdasarkan pertimbangan geografis, topografis, dan oceanografis pantai Sendang Biru merupakan pantai terbaik di Selatan Jawa, karena: (1) berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan IX; yang menjadi alur migrasi ikan pelagis besar, terutama ikan tuna; (2) memiliki *barrier* Pulau Sempu: panjang selat 4 km, lebar 400-1500 m, kedalaman rata-rata 20 m, sehingga perairan di wilayah tersebut relatif tenang; (3) mudah terjangkau oleh transportasi; dan (4) secara topografis kedalaman sesuai untuk berlabuhnya armada penangkapan domestik maupun luar daerah (Hermawan, 2001).

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

Tabel 1 . Produksi Ikan, Nilai Produksi Dan Retribusi Lelang di PPI Pondokdadap Periode Januari S/D Desember 2005

NO	BULAN	PRODUKSI (Kg)	NILAI (Rp)	RETRIBUSI (Rp)
1	JANUARI	158.890	1.028.005.510	30.840.165
2	PEBRUARI	207.845	1.300.104.790	38.955.815
3	MARET	295.511	1.830.173.343	54.905.200
4	APRIL	494.300	3.251.843.069	97.555.292
5	MEI	515.419	2.904.209.729	87.126.292
6	JUNI	677.348	4.403.210.650	132.096.320
7	JULI	809.340	5947.691.165	178.430.734
8	AGUSTUS	1.011.871	7.519.902.544	225.597.076
9	SEPTEMBER	1.125.965	8.438.707.824	253.161.235
10	OKTOBER	670.346	4.985.863.325	149.575.898
11	NOPEMBER	504.750	3.604.635.659	108.139.070
12	DESEMBER	97.826	770.989.670	23.129.691
JUMLAH		6.569.411	45.985.337.278	1.379.512.788

Sumber: Laporan Tahunan PPI 2006 dalam Hermawan, 2006

Potensi tangkapan ikan perairan Malang Selatan cukup besar seperti yang tertera dalam Tabel 1. Data ikan yang berhasil didaratkan di Pusat Pendaratan Ikan Pondokdadap sebesar 6.569 ton pada tahun 2005 yang diklasifikasikan dalam 15 jenis ikan. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Malang target perairan ikan tangkapan di sepanjang tahun 2014 dapat menembus Rp 2 miliar, hal ini berdasar dari hasil positif nilai tangkapan yang di Tempat Pelelangan Ikan Sedangbiru sepanjang tahun 2013 yang melebihi Rp 1,7 miliar per tahun, sepanjang tahun 2013 sudah terealisasi sebesar Rp 2.109.178.965 atau naik 124,07 persen dari target.

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Malang merilis bahwa terdapat 12 jenis ikan dengan jumlah tangkapan paling tinggi yang ditangkap para nelayan Sendangbiru dan dilelang di Pusat Pendaratan Ikan Pondok Dadap. Tujuh tangkapan terbesar dari data sampai bulan November 2013 yakni jenis ikan Tongkol (3.110,3 ton), Layang (2264,82 ton), Cakalang (1674,92 ton), Tuna (1100,89 ton), Baby Tuna (682 ton), Lemuruh (399,52 ton) dan Ekor Merah (229 ton). Ragam tangkapan ikan pun turun dibandingkan dengan tahun 2005, di mana pada tahun 2005 terdapat 15 jenis ikan sedangkan pada tahun 2013 hanya terdapat 12 jenis ikan. Indikasi ragam tangkapan ikan bisa disebabkan beberapa faktor antara lain, *over fishing*, permintaan ikan jenis tertentu kuantitasnya rendah sehingga tidak menggairahkan nelayan untuk menangkapnya, dan bisa dipengaruhi oleh faktor alam.

Jumlah nelayan di tahun 2013 berjumlah 3732 orang, hampir dua kali lipat jumlah nelayan di tahun 2005 yang berjumlah 1438 orang. Bertambahnya jumlah nelayan juga diikuti perkembangan jumlah peralatan nelayan. Peralatan itu meliputi perahu tanpa motor (211 unit), perahu motor tempel (339 unit), kapal motor (401 unit) dan alat tangkap atau jaring (7704 unit). Sedangkan pada tahun 2005 perahu tanpa motor (73 unit), perahu motor tempel (210 unit), kapal motor (174 unit) dan alat tangkap atau jaring (247 unit). Betapa pesatnya perkembangan 394ctor394ry kelautan di Sendangbiru menarik minat para nelayan untuk berkompetisi lebih keras dalam usaha menangkap ikan.

Kehidupan sosioekonomi di Sendang Biru telah lama dipengaruhi oleh kedatangan kelompok migran dari luar, yaitu orang Bugis dan Madura. Pola pekerjaan dan tingkat kesejahteraan nelayan Sendang Biru juga sangat dipengaruhi oleh adanya hubungan *patron – client* (gusti – kawula). Hubungan *patron – client* tersebut bercirikan ketergantungan *client* terhadap *patron* yang lebih berkuasa secara sosial ekonomi. Dalam hubungan tersebut, *client* berharap menerima perlindungan dan bantuan ekonomi dari *patron* selama masa kesulitan. Di Indonesia, adanya hubungan *patron – client*, yang mempunyai latar belakang yang sangat rumit, dapat dilihat dalam masyarakat miskin, yaitu masyarakat nelayan dan petani (Nolan, 2011).

Keberagaman etnis dapat mempengaruhi pilihan-pilihan ekonomi melalui preferensi individu. La Ferrara (2000) mengungkapkan bahwa ketika sebuah populasi heterogen dan utilitas individu atas bergabungnya dengan suatu kelompok, secara positif tergantung atas *share* anggota kelompok dengan salah satu tipe anggota kelompok dan secara 394ctor394ry atas *share* dalam tipe-tipe yang berbeda. Cara kedua keragaman etnis mempengaruhi outcome ekonomi adalah dengan mempengaruhi strategi-strategi yang dimainkan oleh para individu. Greif (1993) mengungkapkan bahwa para pedagang di Medieval berulang kali membentuk koalisi-koalisi sepanjang garis-garis etnis untuk memonitor agen-agen dengan saling bertukar informasi dalam

perilaku oportunistiknya. Afiliasi etnis berguna untuk membantu memperkokoh mekanisme reputasi ketika timbul masalah informasi yang tidak sempurna (*asymmetric information*). Tetapi strategi-strategi dapat didasarkan atas identitas etnis seseorang juga atas timbulnya informasi yang sempurna (*perfect information*). La Ferrara (2003a) menunjukkan bahwa kontrak tidak dapat secara legal ditegakkan (dan juga harus secara “penegakan dimulai dari diri sendiri [*self-enforcing*]”), keanggotaan dari sebuah kelompok etnis membuat pilihan strategi-strategi untuk bekerja sama yang dapat didukung, menjadi semakin besar. Alasan yang masuk akal adalah ketika hukuman dan pembatasan dapat dilaksanakan tidak hanya kepada tiap-tiap individu tetapi bagi para anggota-anggota kelompoknya.

Cara yang terakhir, keberagaman etnis dapat pula memasuki fungsi produksi. Lazear (1999a,b) mendiskusikan bagaimana kemampuan (*skill*) yang berbeda dalam produksi suatu unit juga akan bisa meningkatkan keseluruhan produktivitas. Identifikasi yang dilakukan Lazear mengungkapkan bahwa terdapat *trade off* antara kemanfaatan keberagaman dan biaya-biaya yang mungkin muncul ketika terjadi sulitnya komunikasi antara orang-orang yang berbeda bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Terdapat tingkat optimal dari heterogenitas yang diidentifikasi dengan poin yang optimal pada *trade off*-nya yang merupakan kealiamahan unit produksi dan teknologi yang mengikutinya. Studi O'Reilly Williams dan Barsade memberikan bukti yang mendukung hipotesis tersebut, studi tersebut menganalisis 32 tim pekerjaan dan didapati bahwa semakin beragam maka konfliknya semakin banyak dan juga terjadi komunikasi yang kurang, tetapi dengan mengontrolnya maka hal tersebut nantinya akan membawa produktivitas yang tinggi. Pratt juga mendukung dalam konteks teori tim, yang mana ketika pekerjaan-pekerjaan secara 395ctor395ry saling komplementer maka akan memiliki efek yang positif dan hal-hal lain di sekitarnya akan mengikutinya kemudian (*dalam Alesina, 2005*).

Nelayan individual beroperasi pada lingkungan yang heterogen dan senantiasa menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam kesehariannya. Untuk menyelesaikan ketidakpastian tersebut, maka para nelayan tidak hanya belajar dari pengalaman masa lalu, tetapi juga berpedoman pada saling berbagi informasi dalam jaringan-jaringan sosial yang dimiliki. Jaringan sosial adalah *pattern* hubungan-hubungan secara 395ctor395ry dan horizontal, atau “ikatan” di antara para pelaku (Moore dan Westley, 2001), yang dapat terdiri atas berbagai tipe hubungan-hubungan sosial dari ikatan yang biasa sampai ikatan yang dekat. Jaringan sosial nelayan dalam konteks ini bisa bukan hanya nelayan saja, melainkan para pemilik 395cto, pimpinan suatu 395ctor395ry, para peneliti, pegawai, atau individu lain yang memungkinkan para nelayan untuk berbagi informasi sebagai cara untuk melawan ketidakpastian yang berhubungan dengan proses melaut. Dengan membentuk hubungan dengan orang lain dan berbagi informasi dalam jaringan sosial mereka,

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

maka nelayan bereaksi atas masalah ketidakpastian dengan belajar dari orang lain dan dari jaringan-jaringan sosial nelayan dapat terbentuk modal sosial; aktor yang secara kontekstual bisa menyediakan manfaat bagi individu maupun kelompok (Coleman 1988, Lin 1999).

Dalam konteks nelayan terdapat tiga tipe modal sosial yang dapat diidentifikasi: *bonding*, *bridging*, dan *linking*. Modal sosial terikat (*bonding social capital*) berisikan hubungan sosial yang kuat dalam sebuah kelompok yang memiliki pemikiran yang sama yang berkarakteristik jaringan-jaringan lokal (Grafton, 2005). Ikatan yang kuat dalam modal sosial terikat pada konteks kehidupan nelayan ketika berhubungan dengan kondisi alamiah sumberdaya perikanan. Sumberdaya perikanan dapat bertambah atau berkurang ditentukan oleh level penangkapan; penangkapan ikan dan sumberdaya laut yang lain bersifat bersaing karena ikan yang telah ditangkap sebuah perahu nelayan tidak diperkenankan ditangkap oleh perahu nelayan yang lain; dan kemampuan untuk mengecualikan orang lain dari proses penangkapan ikan terbatas karena mobilitas dari spesies ikan tersebut (Grafton, 2005). Kepercayaan dan kerjasama dapat diturunkan dari modal sosial (Granovetter 1985, Coleman 1990, Pretty dan Ward 2001, Hahn et al. 2006), yang merupakan hal yang sangat vital di antara para nelayan dalam hal tiap nelayan untuk mengobservasi standar, aturan-aturan, praktek menangkap ikan yang berkelanjutan, dan juga menurunkan eksternalitas bagi nelayan individual (Grafton, 2005).

Mengikuti Coleman (1999), tipologi masyarakat *bridging social capital* dalam gerakannya lebih memberikan tekanan pada dimensi *fight for* (berjuang untuk). Yaitu yang mengarah kepada pencarian jawaban bersama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kelompok (pada situasi tertentu, termasuk problem di dalam kelompok atau problem yang terjadi di luar kelompok tersebut). Pada keadaan tertentu jiwa gerakan lebih diwamai oleh semangat *fight for* yang bersifat memberi perlawanan terhadap ancaman berupa kemungkinan runtuhnya simbol-simbol dan kepercayaan-kepercayaan tradisional yang dianut oleh kelompok masyarakat. Pada kelompok masyarakat yang demikian ini, perilaku kelompok yang dominan adalah sekedar *sense of solidarity* (*solidarity making*).

Grafton (2005) merepresentasikan *linking social capital* sebagai hubungan-hubungan lintas skala, terdiri atas ikatan antar jaringan yang berada di level hirarki yang berbeda, seperti hubungan-hubungan antara pengguna sumberdaya dan pemangku kebijakan dalam bidang sumberdaya. Hubungan di luar agen-agen pemerintah dalam bentuknya sebagai *linking social capital* dapat menyediakan peningkatan akses aktor pengetahuan ilmiah. Dan informasi yang berhubungan dengan inovasi teknologi.

Penelitian ini akan membuat karakteristik pembagian informasi di antara nelayan Sendangbiru, secara sistematis juga mengkaji efek keberagaman etnis pada ketiga tipe modal sosial

yaitu *bonding, bridging, dan linking* yang kesemuanya dilihat dari perspektif jaringan sehingga munculah kajian modal jaringan sosial (*social network capital*). Selanjutnya dengan mengerti bagaimana keberagaman etnis dalam pengguna sumberdaya di Sendangbiru, yang dikarakteristikan sebagai interaksi kompetitif di antara para nelayan, juga akan berdampak pada ketiga tipe modal sosial, yang pada akhirnya dapat menyediakan implikasi manajemen dan dapat menjadi rujukan kebijakan-kebijakan perikanan dan kelautan.

Berangkat dari beberapa hal tersebut di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan menganalisa dan memaparkan untuk mengkaji jaringan modal sosial nelayan dan dampak keragaman etnis di kehidupan nelayan Pantai Sendangbiru Kabupaten Malang.

Beberapa masalah yang berkaitan dengan modal sosial nelayan dan keragaman etnis di kehidupan nelayan Pantai Sendangbiru Kabupaten Malang yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: Jumlah nelayan yang meningkat seiring dengan potensi konflik horizontal antar etnis lokal dan pendatang; modal sosial nelayan memiliki keterkaitan dengan keragaman etnis di Pantai Sendangbiru. ketersediaan data komprehensif yang kurang tentang pemetaan struktur setiap etnis pada komunitas nelayan Sendangbiru; dan kebijakan yang berkaitan dengan sosiodemografis nelayan masih kurang dan lebih berfokus pada hasil tangkapan nelayan.

Perumusan Masalah

Berkembangnya infrastruktur pendukung sektor kelautan di Malang Selatan menjadikan Pantai Sendangbiru sebagai "magnet" bagi nelayan pendatang. Dampak ikutannya adalah jumlah nelayan yang terdaftar juga semakin meningkat yang berdampak positif pula dengan naiknya jumlah tangkapan ikan. Di sisi lain, terjadi berbagai masalah baik secara sosial, politik, maupun ekonomi dalam taraf lokal. Kompetisi dihadapkan dengan usaha kelautan yang dituntut semakin efisien. Oleh karenanya diperlukan analisa yang menyeluruh dari berbagai dimensi. Permasalahan pada penelitian modal sosial nelayan dan keragaman etnis di kehidupan nelayan Pantai Sendangbiru Kabupaten Malang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sosiodemografis dan karakteristik modal sosial pada nelayan Pantai Sendangbiru ?
2. Bagaimana struktur nelayan dari setiap etnis yang ada dalam beroperasi di Pantai Sendangbiru ?

Landasan Teori: Ekonomi Politik Heterodoks

Kajian tentang modal sosial dan keragaman etnis ini menggunakan metode ekonomi politik heterodoks. Ekonomi politik heterodoks menekankan pada kombinasi konseptual antara

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

prinsip dasar teori, analisis teknis non-deterministik dan variasi proxy dari data. Kombinasi dari ketiga aspek tersebut merupakan metode untuk melakukan kajian dalam studi ini.

Prinsip dasar teori ekonomi politik yang digunakan dalam kajian ini mencakup pada empat prinsip utama. Prinsip pertama adalah prinsip gelombang panjang yang menekankan pada pentingnya peran faktor sejarah. Faktor sejarah merupakan komponen atau alat yang berfungsi untuk menganalisa karakter atau pola umum dari sesuatu dalam suatu institusi tertentu seiring berjalannya waktu. Karakteristik dari sesuatu akan dilihat berdasarkan aspek ukuran (besar atau kecil) dan juga dilihat berdasarkan aspek amplitudo (gerakan meningkat atau menurun) dalam pengamatan jangka panjang. Sebagai contoh, pola perubahan karakteristik sosial dan budaya terjadi akibat perubahan besaran dari indikator sosioekonomi dan sekaligus waktu periodisasi terjadinya perubahan tersebut. Pola indikator ini akan dikaitkan dengan keberadaan institusi (misal: modal sosial) sebagai penggerak transformasi struktur sosial.

Prinsip kedua adalah prinsip *Circular and Cumulative Causation (CCC)*. Prinsip kausa kumulatif yang menganalisa tentang pola keterkaitan antar faktor dalam struktur sosial di bawah institusi tertentu, yang dapat memacu dampak kumulatif terhadap pola struktur tersebut seiring berjalannya waktu. Dalam konteks ini, prinsip ini melihat peran institusi untuk menjaga keterkaitan antar faktor dalam struktur sosial agar menciptakan dampak kumulatif yang positif dan berkesinambungan pada jangka panjang.

Di dalam ekonomi politik, prinsip CCC dapat menjelaskan hubungan dari beragam jenis variabel yang ada dalam sistem global, dimana akumulasi dari interaksi antar variabel bersifat dinamis dalam periode waktu tertentu (O'Hara 2008). Gunnar Myrdal (1968) berpendapat bahwa CCC adalah sebuah hipotesa riset yang mampu melihat hubungan interaksi dinamis antar variabel sosio-ekonomi. Proses sirkulasi hubungan antar beragam variabel akan membentuk akumulasi sebagai bentuk adanya hubungan sebab-akibat. Akumulasi sebab-akibat akan membentuk dampak yang semakin besar di dalam proses sirkulasi dinamis antar variabel. Proses ini dapat memiliki arti positif atau negatif dalam setiap dampak yang dihasilkan secara berkesinambungan.

Sejalan dengan prinsip CCC tersebut, studi ini membahas jaringan modal sosial dan keragaman etnis di Pantai Sendang Biru. Menurut Putnam (2001), modal sosial dapat diartikan sebagai pola kecenderungan kelompok masyarakat mengembangkan potensi individu (misal: kepercayaan dan jejaring) dan komunal (misal: institusi norma, moral dan etika) untuk meningkatkan kualitas hidup sebagai kumulatif kausa dari keterkaitan struktural antar potensi tersebut. Dalam konteks ini, keterkaitan struktural antar potensi jaringan modal sosial dipersepsikan merupakan suatu keterkaitan struktural yang terjadi dalam suatu periode tertentu sehingga menghasilkan manfaat kausa kumulatif.

Nilai manfaat dari jejaring modal sosial ini diasumsikan sebagai dampak dari proses sirkulasi hubungan antar masyarakat dan lingkungan yang mengalami amplifikasi dalam periode waktu tertentu. Dalam studi ini, proses analisis akan dilakukan melalui dua tahap, yaitu identifikasi manfaat dan pembuatan model untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat dari pola jejaring modal sosial yang ada.

Prinsip CCC didukung dengan metode pembahasan yang berbasis pada penyusunan preposisi dan generalisasi subjek permasalahan (subjek riset). Kaldor (1957) memperkenalkan konsep *stylized fact* dalam menganalisa suatu permasalahan. Konsep *stylized fact* mengarahkan analisa pada pengambilan pola umum (*general pattern*) terhadap suatu hubungan relasi antar beberapa aspek atau variabel. Namun pengambilan pola umum ini berbeda dengan proses generalisasi suatu riset deduktif.

Pada konteks *stylized fact*, pola yang terbentuk dengan berbasis pada subjek riset bukan digeneralisasi untuk melihat kondisi secara makro dan luas, melainkan proses generalisasi dilakukan untuk menguraikan apa dan bagaimana kondisi yang terjadi pada subjek. Struktur keterkaitan fakta pada subjek akan diobservasi untuk didapatkan pola struktur umum yang relatif lazim terjadi berulang dalam periode waktu tertentu pada subjek riset

Prinsip ketiga adalah prinsip kontradiksi dalam struktur sosial. Prinsip ketiga ini lebih menekankan pada pola pergerakan faktor-faktor struktur sosial yang berpotensi mengalami anomali satu dengan yang lain di bawah sebuah institusi tertentu. Kondisi kontradiksi antar faktor-faktor dalam struktur sosial dapat terjadi apabila institusi tidak dapat menjaga kesinambungan dan keselarasan dalam keterkaitan antar faktor. Dampak kumulatif yang bersifat positif bagi sistem kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berubah menjadi situasi kontradiktif.

Ketiga prinsip di atas akan dikaitkan dalam mendukung analisis non-deterministik dalam kajian ini. Analisa non-deterministik merupakan analisa yang tidak dengan baku dan rigid dalam menggunakan data-data kuantitatif sebagai faktor *determinant* suatu pola, kejadian atau masalah tertentu (Lawson 1989). Analisa ini akan melihat karakter atau pola suatu data dalam jangka panjang sehingga dapat dilihat siklus umum dan siklus khususnya. Pada siklus khusus, analisa ini akan menekankan untuk pencarian data-data untuk menjelaskan kenapa siklus khusus itu dapat terjadi di luar pola siklus umum.

Analisa non-deterministik juga menekankan pada aspek holistik yang menganalisa suatu peristiwa atau permasalahan dari berbagai sisi dan sudut pandang. Veblen (1989) menjelaskan bahwa keterkaitan antar faktor-faktor dalam sistem harus dilihat sebagai suatu sistem yang utuh dan dinamis. Boulding (1984) melihat keterkaitan antar faktor dalam sistem dunia merupakan

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

suatu sistem total yang tidak dapat dianalisa secara parsial jika akan mengetahui pola dan karakteristiknya. Dalam konteks ini, analisa non-deterministik akan lebih melihat akar permasalahan institusi dan struktur sosial dari beberapa aspek dalam suatu sistem.

Di dalam mendukung analisa non-deterministik tersebut, diperlukan beragam data yang dapat menjadi proxy dari bermacam aspek atau faktor yang ada dalam sistem dunia. Beragam proxy data yang dikumpulkan dalam analisa ini bersifat menyesuaikan dengan pola dan karakter permasalahan yang ada. Dalam proses pengumpulan dan verifikasi data, beragam proxy data akan memunculkan beberapa batasan atau limitasi dalam kajian ini. Permasalahan heterogenitas data akan menyebabkan data terkadang tidak dapat dikomparasi secara kaidah statistik. Namun dengan penekanan pada non-deterministik, komparasi data akan berpedoman pada prinsip dalam ekonomi politik heterodoks untuk menjelaskan permasalahan dan akan mengurangi ketergantungan dengan kaidah statistik. Di samping itu, proxy data juga terkadang memiliki runtun waktu yang berbeda-beda karena berasal dari aspek yang beragam. Dalam hal ini, proxy data pun terkadang memiliki kekuatan yang lemah dalam mengukur proses dari suatu aspek tertentu. Hal ini menjadi bagian dari limitasi kajian ini tanpa mengurangi proses metodologis dalam mengurai permasalahan.

Analisis dan Pembahasan

Dalam memudahkan dalam pengamatan *stylized fact* terhadap modal social dan keragaman etnis pada nelayan pantai Sendang Biru, studi ini akan membagi analisa ke dalam tiga aspek, yaitu *amplitude*, *periodicity* dan *regularity*. Untuk lebih memudahkan analisa, Tabel 1 memperlihatkan secara sederhana tentang *stylized fact* tentang kondisi jejaring modal sosial dan keragaman etnis nelayan di pantai Sendang Biru.

Tabel 1 Stylized Fact Modal Sosial dan Keragaman Etnis Nelayan Pantai Sendang Biru

	Lingkungan Alam	Sistem Relasi Sosial	Sosio-ekonomi
<i>Amplitudo</i>	Kuantitas nelayan suku Jawa mendominasi diikuti suku Madura dan suku Bugis	Suku Bugis dan Madura lebih mudah menyesuaikan diri sebagai pendatang dan sekaligus perubahan alam/iklim	Penyesuaian sistem modal sosial yang baik dalam menghadapi lingkungan alam dapat mendorong nelayan suku Bugis relatif mendapat hasil tangkapan lebih banyak dibandingkan nelayan suku lainnya
<i>Periodicity</i>	Nelayan suku Jawa (setempat) yang secara kuantitas lebih banyak namun tidak berbanding lurus dengan eksistensi sosiokultural mereka sebagai "pemilik wilayah"	Suku Bugis dan Madura lebih berhasil membangun jejaring dengan menguasai kelembagaan yang berkaitan dengan nelayan (misal: menjadi ketua kelompok koperasi nelayan; kepala pengelolaan tempat pelelangan ikan)	Modal kemampuan menghadapi alam dan penguasaan kelembagaan dapat mempermudah nelayan pendatang (terutama suku Bugis) untuk melakukan akumulasi profit untuk menambah modal
<i>Regularity</i>	Pola relasi core-periphery terjadi dimana suku pendatang (terutama Bugis) berperan sebagai core yang memelihara ketergantungan suku setempat (suku Jawa) dan Madura secara sosioekonomi.	Posisi suku Bugis sebagai core menciptakan ketergantungan pada suku Jawa dan Madura. Contoh: suku Bugis berperan sebagai pemodal (kapal, alat tangkap dan bahan bakar), sementara suku Jawa dan Madura berperan sebagai nelayan penangkap	Dalam konteks sosioekonomi, nelayan suku Bugis berada dalam posisi struktur kelas sosial yang lebih mapan dibandingkan nelayan suku Jawa dan Madura. Nelayan suku Bugis menjadi kelas pemilik modal, sedangkan nelayan suku lainnya menjadi kelas pekerja

Sources: Data diolah

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat beberapa *stylized fact* yang berkaitan dengan prinsip ekonomi politik dalam konteks modal sosial dan keragaman etnis nelayan pantai Sendang Biru. *Stylized fact* pertama berkaitan dengan pola historis, dimana terjadi transformasi sosiodemografis etnis nelayan. Sebagai bukti empiris, dominasi hegemoni kuantitas nelayan suku Jawa (setempat) bergeser menjadi dominasi hegemoni modal (kapital) pada nelayan suku Bugis.

Dalam *stylized fact* ke-2, nelayan suku Bugis mengalami proses sirkulasi dan kausa kumulatif dalam usaha mereka mendapatkan hegemoni dalam struktur sosial nelayan di pantai tersebut. Kemampuan mereka menghadapi kondisi alam dan dalam memanfaatkan jejaring modal sosial (misal: menjadi ketua kelompok nelayan, ketua koperasi) menciptakan dampak kausa kumulatif positif dimana mereka dapat menjadi pemilik modal. Sebagai konsekuensi logis, nelayan etnis Jawa dan Madura diposisikan berperan sebagai kelas pekerja.

Stylized fact ketiga memfokuskan pada terjadinya pola kontradiksi antar etnis mayoritas dan minoritas. Dalam konteks ini, karakteristik etnis yang ada membentuk pola core-periphery antara nelayan suku Bugis dengan nelayan etnis lainnya. Nelayan suku Bugis yang notabene minoritas dari aspek kuantitas justru memiliki kapasitas sebagai mayoritas pemegang modal. Di sisi lain, nelayan suku Jawa yang relatif paham dengan kondisi alam setempat, justru tidak mampu berperan dan unggul dari sisi sosioekonomi.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, studi ini mengambil beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan jejaring modal sosial dan keragaman etnis:

1. Modal sosial dalam bentuk ketahanan terhadap kondisi alam dan kemampuan berperan aktif dalam struktur kelembagaan di masyarakat dapat mendorong dampak kausa kumulatif (contoh: transformasi sosioekonomi ke arah yang lebih baik pada nelayan suku Bugis).
2. Modal sosial yang dimiliki nelayan suku Bugis bukan saja mampu menciptakan transformasi sosioekonomi yang lebih baik bagi mereka, namun juga mampu menciptakan transformasi kondisi struktur sosial (contoh: nelayan suku Bugis mampu menjadi kelas pemilik modal dan bahkan menciptakan ketergantungan pada nelayan etnis lain, seperti Jawa dan Madura).
3. Pola ketergantungan core-periphery antara nelayan suku Bugis (core) terhadap nelayan Jawa dan Madura (periphery) berlangsung melalui proses dominannya modal sosial di suku core terhadap periphery dalam rentang waktu tertentu.
4. Kajian modal sosial dan keragaman etnis nelayan ini merupakan kajian pendahuluan yang hanya berfokus pada bentuk modal sosial dalam pola keragaman etnis, namun belum dapat

mencakup implikasi yang mendetail tentang transformasi sosiekonomi sebagai akibat transformasi modal sosial.

Daftar Pustaka

- Alesina, Alberto, and Eliana La Ferrara. 2005. Ethnic diversity and economic performance. *Journal of Economic Literature* 43(3): 762-800.
- Barnes, M. L. 2012. Bonding, bridging, and linking social capital in an ethnically diverse fishery: the case of Hawaii's longline fishery. University of Hawaii at Manoa, Honolulu.
- Coleman, J. S. 1990. *Foundations of Social Theory*. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, USA.
- Coleman, J. S. 1999. *Social Capital in the Creation of Human Capital*. Cambridge Mass: Harvard University Press.
- Coleman, J. S. 1988. Social capital in the creation of human capital. *Am. J. Sociol.*, 94:95-120.
- Crona, B. and Ö. Bodin. 2006. What you know is who you know? Communication patterns among resource users as a prerequisite for co-management. *Ecol. Soc.*, 11:7.
- Crowe, J. A. 2007. In search of a happy medium: How the structure of interorganizational networks influence community economic development strategies. *Soc. Net.*, 29:469-488.
- Grafton, R. Q. 2005. Social capital and fisheries governance. *Ocean Coast. Manage.*, 48:753-766.
- Greif, A. (1993), "Contract Enforceability and Economic Institutions in Early Trade: The Maghribi Traders' Coalition", *American Economic Review*, 83(3), 525-548.
- Granovetter, M. 1985. Economic action and social structure: the problem of embeddedness. *Am.J. Sociol.*, 481-510.
- Hahn, T., P. Olsson, C. Folke, and K. Johansson. 2006. Trust-building, knowledge generation and organizational innovations: the role of a bridging organization for adaptive comanagement of a wetland landscape around Kristianstad, Sweden. *Human Ecol.*, 34:573-592.
- Hanneman, R. A. and M. Riddle. 2005. *Introduction to Social Network Methods*. University of California Riverside.
- Hermawan, D., Wahono, Handajani, 2001. Analisis Potensi Perikanan di Perairan Kabupaten Malang. Balitbangda Kabupaten Malang.
- Hermawan, David. 2006. Prospektif Pengembangan Kawasan Pesisir Sendang Biru Untuk Industri Perikanan Terpadu. *Prospektif Pengembangan Kawasan Pesisir Sendang Biru*. Vol. 13 No. 2 Tahun 2006

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

- Kaldor, Nicholas. (1957). "A Model of Economic Growth". *The Economic Journal*, Volume 67, (Number 268):pp. 591-624.
- . (1961). *Capital Accumulation and Economic Growth*. In *The Theory of Capital*, edited by F. A. Lutz, Hague, D. C. London: McMillan.
- Lawson, Tony. 1989. "Abstraction, Tendencies and Stylized Facts: A Realist Approach to Economic Analysis". *Cambridge Journal of Economics*, Volume 13:pp. 59-78.
- La Ferrara, E. 2002a, "Inequality and Participation: Theory and Evidence from Rural Tanzania", *Journal of Public Economics*, 85(2), 235-273.
- Lazear E 1999a "Globalization and the market for team-mates" *Economic Journal* 109, 15-40.
- Lazear E. 1999b "Culture and Language" *Journal of Political Economy*, Supplement, 95-125
- Lin, N. 1999. Building a network theory of social capital. *Connections*, 22:28-51.
- Moore, M. L. and F. Westley. 2011. Surmountable chasms: Networks and social innovation for resilient systems. *Ecol. Soc.*, 16:5.
- Myrdal, Gunnar. 1944. *An American Dilemma*. New Jersey, United States: Harper and Row.
- . (1968). *Asian Drama: An Inquiry into Poverty of Nations*. 3 vols. New York: Twentieth Century Fund.
- Nolan, Brooke. 2011. *Ekonomi Politik Masyarakat Nelayan Skala Kecil: Sebuah Studi Perbandingan Masyarakat Pendatang di Rote Ndao dan Jawa Timur*. Laporan Hasil Penelitian Australian Consortium for In Country Indonesian Studies (ACICIS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang Januari 2011
- O'Hara, Philip Anthony. 2007. "Uneven Development, Global Inequality and Ecological Sustainability: Recent Trends and Patterns". *CLM Economia*, Volume 10 in Spanish:20 pp.
- . (2008). "A Myrdalian Holistic Perspective on Global and Regional Performance and Uneven Development". *Working Paper Global Political Economy Research Unit*.
- Polanyi, Karl. 1944. *Great Transformation*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Pretty, J. and H. Ward. 2001. Social capital and the environment. *World Development.*, 29:209-227.
- Ramirez-Sanchez, S. and E. Pinkerton. 2009. The impact of resource scarcity on bonding and bridging social capital: the case of fishers' information-sharing networks in Loreto, BCS, Mexico. *Ecol. Soc.*, 14:22.
- Rubianto, I., 2001. Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Malang. *Makalah*. Pemerintah Kabupaten Malang.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

O' Reilly C., K. Williams and S. Barsade (1997) "Demography and group performance"
unpublished

Veblen, Thorstein. 1898a. *The Theory of Leisure Class: An Economic Study in the Evolution Institutions*.
New York: Macmillan.

———. 1898b. "The Instinct of Workmanship and the Irksomeness of Labor". *American Journal
of Sociology*, Volume 4, (Number 2):pp. 187-201.

———. 1904. *The Theory of Business Enterprise*. New York: Augustus M. Kelley.

———. 1908. "On the Nature of Capital". *The Quarterly Journal of Economics*, Volume 22, (Number
4):pp. 517-542.